

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kecamatan Karangsembung disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp.0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 0,- dan mengalami penurunan/kenaikan sebesar 0 % .Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp.2.334.241.941,00 dari anggaran sebesar Rp.2.460.010.000,00 atau mencapai 94,89 %. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 2.013.492.189,00 realisasinya mengalami kenaikan sebesar 11,24 %.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	PROSENTASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	2.026.679.000,-	1.902.868.132,-	93,89
2. Belanja Barang	410.274.000,-	408.588.809,-	99,59
3. Belanja Hibah	-	-	
Jumlah Belanja Operasi	2.436.953.000,-	2.311.456.941,-	94,85
Belanja Modal			

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	PROSENTASE %
1. Belanja Modal Tanah	-	-	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.057.000,-	22.785.000,-	98,82
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Belanja Modal	23.057.000,-	22.785.000,-	98,82
JUMLAH BELANJA	2.460.010.000,-	2.334.241.941,-	94,89

2. Realisasi Belanja Per Kegiatan

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	Prosen tase
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.234.404.000	2.109.481.589	94,41
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.200.000	14.162.600	99,74
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.200.000	8.195.800	99,95
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.966.800	99,45
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.023.789.000	1.899.546.003	93,86
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.008.289.000	1.884.478.132	93,84
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.500.000	15.067.871	97,21
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.836.000	49.734.750	99,80
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.998.000	99,97
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	16.984.000	99,91
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	100,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000	11.931.300	99,43

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.500.000	100,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.836.000	1.821.450	99,21
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.057.000	22.785.000	98,82
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.057.000	22.785.000	98,82
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.522.000	48.450.612	99,85
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	23.980.112	99,92
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.522.000	21.470.500	99,76
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	74.802.624	99,74
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	36.953.324	99,87
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	5.930.000	98,83
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	17.000.000	100,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.919.300	99,46
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.792.000	52.748.400	99,92
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.792.000	52.748.400	99,92
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	52.792.000	52.748.400	99,92
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000	7.979.900	99,75
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.000.000	7.979.900	99,75

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.000.000	7.979.900	99,75
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	164.814.000	164.032.052	99,53
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	164.814.000	164.032.052	99,53
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	11.968.100	99,73
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.500.000	8.452.100	99,44
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.000.000	8.888.800	98,76
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000	5.984.800	99,75
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	7.993.200	99,92
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.000.000	21.924.200	99,66
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	92.314.000	91.868.300	99,52
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000	6.952.552	99,32
JUMLAH		2.460.010.000	2.334.241.941	94,89

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Tidak terdapat pendapatan daerah sesuai potensi wilayah di Kecamatan Karangsambung.

2. Belanja

Belanja yang tidak terserap sebagai berikut :

- a. Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp14.200.000,- realisasi Rp14.162.600,- atau 99,74 karena adanya efisiensi belanja dan pembulatan.
- b. Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 2.023.789.000, realisasi Rp. 1.899.546.003,- atau 93,86 %, karena adanya kekosongan pejabat pada beberapa bulan dan pembulatan.
- c. Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp. 49.836.000,- realisasi Rp 49.734.750,- atau 99,80 %, karena efisiensi anggaran dan pembulatan.
- d. Kegiatan: pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp. 23.057.000,- realisasi Rp. 22.785.000,- atau 98,82 % karena efisiensi anggaran.
- e. Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp. 48.522.000,- realisasi Rp. 48.450.612,- atau 99.85 % karena efisiensi anggaran dan pembulatan.
- f. Kegiatan: pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 74.802.624,- atau 99,74 % karena efisiensi anggaran dan pembulatan.
- g. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp. 8.000.000,- realisasi Rp. 7.979.900,- atau 98,75 % karena efisiensi anggaran dan pembulatan.
- h. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp. 164.814.000,- realisasi Rp. 164.032.052,- atau 99,53 % karena efisiensi anggaran dan pembulatan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan – LRA.

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp.0,- Terealisasikan sebesar Rp.0,- atau 0 % dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan OPD Kecamatan Karangsambung Tahun Anggaran 2023

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0	0

Pendapatan OPD Kecamatan Karangsambung Tahun Anggaran 2023 mencapai/tidak mencapai target sebesar 0 % dari anggaran namun naik/turun 0 % dari realisasi Tahun 2022.

a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.0,- terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	-	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

1) Pajak Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp. -

Rp. -

Pajak Daerah sebesar Rp. - terdiri dari:

Pajak Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel	-	-	-	-
Pajak Restoran	-	-	-	-
Pajak Hiburan	-	-	-	-
Pajak Reklame	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-
Pajak Parkir	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar 0 % naik sebesar 0 % dibandingkan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 yang sebesar Rp.0. Dari rincian objek pendapatan Pajak Daerah, yang melampaui adalah pajak..-.....sebesar 0 %, sedangkan yang tidak melampaui target adalah pajak....-..... yang terealisasi sebesar 0 %, hal itu disebabkan-...

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat rincian pendapatan pajak daerah yang mengalami peningkatan yaitu.....-.... dan rincian objek tidak mencapai target yaitu Pajak-..... disebabkan.....-.....

2) Retribusi Daerah

Anggaran

Realisasi

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Retribusi Daerah yang dikelola OPD Kecamatan Karangsembung sebesar Rp..0,- terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-

Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-
Retribusi Terminal	-	-	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Pendapatan dari Retribusi terealisasi%, mengalami penurunan/kenaikan sebesar% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Tahun 2022 yang sebesar Rp.....,00. Hal itu disebabkan.....

b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola OPD Kecamatan Karangsembung terealisasi sebesar Rp.0,- dari anggaran sebesar Rp. 0,- terdiri dari:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2023		(%)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
Pendapatan denda pajak	-	-	-	-
Pendapatan denda retribusi	-	-	-	-
Pendapatan dari pengembalian	-	-	-	-
Pendapatan dari BLUD	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah lainnya	-	-	-	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan dana Bergulir	-	-	-	-
Dana BOS	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 terealisasi 0.%, naik sebesar 0 % dibandingkan Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2022 yang sebesar Rp 0 Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melampaui target anggaran yang ditetapkan adalah pendapatan 0 yaitu sebesar 0.%. Sedangkan untuk yang tidak mencapai target yaitu pendapatan 0

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

1.-.....

2. Belanja - LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Karangsembung TA. 2023 adalah sebesar Rp.2.334.241.941,- atau 94,89 % dari anggaran sebesar Rp.2.480.010.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA. 2023 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	2.026.679.000,-	1.902.868.132,-	93,89	1.705.584.655,-
2. Belanja Barang	410.274.000,-	408.588.809,-	99,59	307.907.543,-
3. Belanja Hibah	-	-		
4. Belanja bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi	2.436.953.000,-	2.311.456.941,-	94,85	2.013.492.189,-
Belanja Modal				
1. Belanja Modal Tanah	-	-		
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.057.000,-	22.785.000,-	98,82	0
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		
4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	-	-	-	-
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		
6. Belanja Modal aset tak berwujud				

Jumlah Belanja Modal	23.057.000,-	22.785.000,-	98,82	0
JUMLAH BELANJA	2.460.010.000,-	2.334.241.941,-	94,89	2.013.492.189,-

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dengan TA. 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 320.749.452,00,-

Dengan rincian Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 297.964.452,- dan Belanja Modal mengalami kenaikan Rp. 22.785.000,-

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 2.311.456.941,- mencapai 94,85% dari anggaran sebesar Rp. 2.436.953.000,-apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 yang sebesar Rp. 2.013.492.189,- mengalami kenaikan sebesar 11,24 %.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah TA. 2023 dan 2022 tersaji sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

Belanja Operasi	2023		2022 (%)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1. Belanja Pegawai	2.026.679.000	1.902.868.132		1.705.584.655
a. Gaji dan Tunjangan	1.244.798.000	1.144.057.889		1.025.543.623
b. Tambahan Penghasilan PNS	781.881.000	758.810.248		649.622.532
c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-		-
d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-		-
e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-		-
f. Uang Lembur	-	-		-
g. Belanja Honorarium PNS	18.390.000	18.390.000		
h. Belanja Honorarium Non PNS	6.650.000	6.650.000		
2. Belanja barang	410.274.000	408.588.809		307.907.534
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	77.216.600	76.471.850		
b. Belanja Bahan/Material	11.800.000	11.779.300		
c. Belanja Jasa Kantor	92.930.000	92.837.112		
d. Belanja Premi Asuransi	685.000	292.571		

e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.099.600	41.984.006		
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	23.530.800	23.522.000		
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-		
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-		
i. Belanja Sewa Alat Berat				
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.880.000	4.880.000		
k. Belanja Makanan dan Minuman	105.132.000	104.912.000		
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-		
m. Belanja Pakaian Kerja	-	-		
n. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-		
o. Belanja Perjalanan Dinas	29.930.000	29.900.000		
p. Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-		
q. Belanja Pemeliharaan	22.070.000	21.999.970		
r. Belanja Jasa Konsultansi	-	-		
s. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-		
t. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-		
u. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	-		
v. Belanja Pegawai BLUD	-	-		
w. Biaya Jasa Pihak Ketiga	-	-		
x. Belanja Beasiswa peserta didik	-	-		
y. Belanja Barang Dan Jasa BLUD	-	-		
z. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-		
3. Belanja Hibah	-	-		
a. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	-	-		
b. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-		
4. Belanja Bantuan sosial	-	-		
a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	-		
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	-	-		
Total Belanja Operasi	2.438.953.000	2.311.456.941		2.013.492.189

Belanja hibah sebesar Rp...-..... direalisasikan untuk-..... Sedangkan belanja Bantuan Sosial sebesar Rp...-.... direalisasikan untuk.....-.....

b) Belanja Modal

Belanja Modal	2023		(%)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	23.057.000	22.785.000	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan				

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset tetap Lainnya				
Belanja Aset Tak Berwujud				
Jumlah	23.057.000	22.785.000	-	-

Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp. 22.785.000,- atau tercapai 98,8 % dari anggaran sebesar Rp 23.057.000,- Dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp. 0,- realisasi belanja modal tahun 2023 mengalami peningkatan 98,8%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2023		(%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
.Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	23.057.000	22.785.000	98,8
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tak Berwujud	-	-	-
Jumlah	23.057.000	22.785.000	98,8

Belanja modal yang realisasinya tertinggi sebesar 98,8% adalah belanja modal Peralatan dan Mesin Sedangkan belanja modal yang realisasinya terendah yaitu belanja modal 0 dengan realisasi 0 %, hal ini disebabkan karena hanya terdapat satu belanja modal.

Kontribusi terbesar belanja modal adalah belanja modal Peralatan dan Mesin yang mencapai 98,8 % dari total belanja modal.

3.2.1 Laporan Operasional

3.2.1.1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
1	PAD – LO	-	-
2	Transfer – LO	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	-	-
Jumlah		-	-

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2023 meningkat / turun sebesar Rp 0 atau sebesar 0 % dibandingkan tahun sebelumnya.

3.2.1.2. Beban - LO

Realisasi Beban OPD Kecamatan Karangsembung pada TA.2023 adalah sebesar Rp.2.312.413.122,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Kenaikan /Penurunan %
BEBAN			
Beban Operasi	2.312.413.122,-	2.271.203.451,-	
Beban Transfer	-	-	
Beban Luar Biasa	-	-	
Total Beban	2.312.413.122 ,-	2.271.203.451,-	

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp. 2.312.413.122,00,- terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.903.798.981,-	1.707.883.803,-	11,47
2	Beban Barang dan Jasa	408.624.141,-	563.319.642,-	27,46
6	Beban Bunga	-	-	
7	Beban Subsidi	-	-	
8	Beban Hibah	-	-	
9	Beban Bantuan Sosial	-	-	
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	254.998.962,-	-100

No	Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
11	Beban Penyisihan Piutang	-	-	
12	Beban Lain - Lain	-	-	
	Jumlah	2.312.413.122,-	2.271.203.451,-	1,81

Dari tabel diatas dapat diketahui beban LO tahun 2023 meningkat sebesar Rp. (41.209.671,-), atau sebesar (1,81) % dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai OPD Kecamatan Karangsambung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.903.798.981,-

2. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang Jasa TA 2023 sebesar Rp. 408.624.141,-

3. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah pada OPD Kecamatan Karangsambung TA 2023 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Beban	Penerima
1	2	3	4
1	Beban Hibah	0	0
	Jumlah	0	0

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 0 merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
4.	Beban Penyusutan Aset lainnya		
5.	Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud		
	Jumlah		0

5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang OPD Kecamatan Karangsambung tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,-

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

6. Surplus/defisit – LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2023 sebesar Rp.(2.312.413.122) atau naik sebesar 1,8 % dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.(2.271.203.451)

3.1.2. Neraca

3.1.2.1. Aset

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.315.900,- dan Rp.297.800. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Kecamatan Karangsambung per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Aset Lancar	TA 2023	TA 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
4	Investasi Jangka Pendek	-	-
5	Piutang Pendapatan	-	-
6	Piutang Lainnya	-	-
7	Penyisihan Piutang	-	-
8	Beban dibayar di muka	-	-
9	Persediaan	315.900	297.800
	Jumlah	315.900	297.800

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- . saldo ini merupakan

kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU/Pajak yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke OPD Kecamatan Karangsembung per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	Kecamatan Karangsembung	0	31 Desember 2023

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

Per 31 Desember 2023 masih terdapat Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	-	-
2.		
3.		

3) Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- terdiri dari saldo kas di BLUD dan saldo kas lainnya berupa sisa dana Bantuan Operasional Sekolah. Dana BOS ini bagian dari hibah langsung yang dikelola oleh sekolah dan dilaporkan ke Bupati sebagai bagian dari Laporan Keuangan Daerah. Saldo Kas Lainnya disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Kas Lainnya	Nilai (Rp)	Ket
1.	Kas di BLUD	-	-
2.	Kas di Bendahara BOS	-	-
	Jumlah	-	-

4) Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Tidak terdapat pendapatan yang belum dibayar/ piutang.

5) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 315.900,- dan Rp. 297.800,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp0,-

No	Persediaan	TA 2023	TA 2022
1	Bahan habis pakai	315.900	297.800
2	Bahan/material	0	0
3	Barang lainnya	0	0
	Jumlah	315.900	297.800

b. Aset Tetap

Nilai AsetTetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp.7.045.454.579,- dan Rp.7.046.305.239,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Karangsembung per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2023	T.A. 2022
1	Tanah	2.356.634.070,-	2.356.634.070,-
2	Peralatan dan Mesin	1.356.651.867,-	1.357.502.617,-
3	Gedung dan Bangunan	5.094.791.709,-	5.094.791.709,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.217.000,-	100.217.000,-

5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Jumlah		7.045.454.579,-	7.046.305.239,-

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki OPD Kecamatan Karangsembung per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 2.356.634.070,00 dan Rp. 2.356.634.070,00

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.356.634.070,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Mutasi dari SKPD lain	Rp	-
Koreksi tambah Aset		
Total Tambah		
Mutasi kurang:	Rp	-
Mutasi ke SKPD lain	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Total kurang		
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.356.634.070,00

Adapun Tanah OPD senilai Rp 2.356.634.070,00,- terletak pada :

1	Desa Karangsembung	Karangsembung	1970	1823 m2	65.628,00
2	Desa Karangsembung	Karangsembung	1970	414 m2	90.917,00
3	Desa Kaligending	Karangsembung	2016	6986 m2	2.105.413.070,00
4	Desa Kaligending	Karangsembung	2017	377	94.676

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 1.356.651.867,- dan Rp. 1.357.502.617,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp. 1.357.502.617,-
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp. 22.785.000,-
Mutasi dari SKPD lain	Rp. -

Hibah	Rp. -
Total tambah	Rp. 22.785.000,-
Mutasi kurang:	Rp. -
Penghapusan	Rp. -
Rusak Berat	Rp. 23.635.750,-
Mutasi ke SKPD lain	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp. -
Total kurang	Rp. 23.635.750,-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp. 1.356.651.867,-

Adapun mutasi tambah sebesar Rp. 22.785.000,- merupakan belanja modal pada tahun 2023 (detail terlampir). dan penghapusan aset sebesar Rp. 23.635.750,- dikarenakan rusak berat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Komputer	2023	5	unit	22.785.000,-	Belanja Modal
2	Peralatan Kantor/Rmah Tangga	2015	2	unit	3.795.000,-	Rusak Berat
3	Alat Studio Komnikasi	2016	1	unit	4.540.750,-	Rusak Berat
4	Komputer	2015-2018	6	unit	15.300.000,-	Rusak Berat
5						
Jumlah					-850.750	

Jumlah akhir aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.356.651.867,- sebagaimana mutasi berikut :

NO	LOKASI PERALATAN	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
	Kantor Kecamatan Karangsambung, Desa Kaligending	1.357.502.617	22.785.000	23.635.750	1.356.651.867

3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 5.094.791.709,00,- dan Rp. 5.094.791.709,-

Saldo per 31 Desember 2022	5.094.791.709,-
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	
Mutasi dari SKPD lain	

Koreksi / Reklas tambah Aset	
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD Lain	
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	Rp. 5.094.791.709,-,-

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 5.094.791.709,-, terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bangunan Gedung Kantor	Rp 300.702			Rp 300.702
2	Bangunan Gedung Kantor Prmanen	Rp 82.200			Rp 82.200
3	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Rp 3.391.880			Rp 3.391.880
4	Bangunan Gedung tempatlbadah permanen	Rp 39.700			Rp 39.700
5	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Rp 120.000			Rp 120.000
6	Gedung Garasi/Pool Permanen	Rp 64.400			Rp 64.400
7	Rumah Negara Golongan III tipe B Permanen	Rp 203.031			Rp 203.031
8	Bangunan Gedung Kantor Kec. Karangsambung lanjutan				
	Jumlah	Rp	Rp	- Rp	- Rp

Belanja Modal sebesar Rp. - merupakan belanja Modal OPD Kecamatan Karangsambung pada tahun 2023 (rekap terlampir). Adapun penambahan sebesar Rp.388.019.600,00,- dikarenakan mutasi tambah antar SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung/Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Karangsambung lanjutan	2.021			Rp 388.019.600	
	Jumlah				Rp 388.019.600	

Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp-..... merupakan penghapusan atas Gedung yang berada di.....-..... karena-..... Adapun rincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung /Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1						
2						
	Jumlah				Rp	-

Sedangkan untuk mutasi kurang sebesar Rp-..... merupakan mutasi antar SKPD atas-..... dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Ket.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	Jumlah		Rp	-

Sedangkan reklas kurang sebesar Rp-..... merupakan aset Gedung Bangunan yang nilainya di bawah kapitalisasi sehingga direklas ke aset Ekstrakomtabel dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung/Bangunan	Tahun Perolehan	Vol	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1						
2						
3						
4						
	Jumlah				Rp	-

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.100.217.000,00 dan Rp.100.217.000,00

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 100.217.000,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi dari SKPD LAin	Rp -
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp -
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 100.217.000,00

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp.100.217.000,00 merupakan Jaringan yang dimiliki Mutasi Kurang sebesar Rp 0 adalah yang penganggarannya melalui Belanja Modal pada tahun 2023 dan dimutasikan pada tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Air	88.197.000,00
2	Jaringan	12.020.000,00
3		
	Jumlah	100.217.000,00

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-
Mutasi tambah:		
Belanja Modal	Rp	-
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	-
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp	-
Total Tambah		
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghapusan Aset	Rp	-
Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD	Rp	-
Koreksi/reklas aset	Rp	-
Total Kurang		
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 0,- terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1					Rp -
2					Rp -
3					Rp -
4					Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi tambah sebesar Rp 0,- merupakan perolehan Belanja Modal buku pada tahun 2023 Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp 0 merupakan mutasi kurang atas Belanja Modal Buku yang (rekap detail terlampir).

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp00 dan Rp00

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	-
Mutasi tambah:		
Koreksi	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penyelesaian KPD	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-

7) Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD..... TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (.....) dan Rp (.....) OPD Kecamatan Karangsembung tahun 2023 merupakan tahun ke-4 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke acrual basis, sehingga tahun 2023 merupakan tahun ke-4 dalam melakukan penyusutan.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal OPD Kecamatan Karangsembung sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada OPD Kecamatan karangsambung untuk tahun 2023.

d. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp dan Rp Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

1) Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp..... dan Rp.....

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2022	
Mutasi tambah:	Rp -
Pembelian Software	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	Rp -

2) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp..... dan Rp..... Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp -
Mutasi tambah:	
Belanja Modal 2022	Rp -
Mutasi dari SKPD Lain	Rp -
Koreksi	Rp -
Reklas	Rp -
Total Tambah	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD lain	Rp -
Koreksi	Rp -
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	Rp -

Koreksi tambah sebesar Rp..... merupakan koreksi atas rusak berat karena penghapusannya baru dilakukan tahun 2023. Sedangkan untuk reklas tambah dari Aset Tetap senilai Rp..... merupakan penambahan atas aset lainnya berupa barang rusak berat sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

Sedangkan Penghapusan sebesar Rp.....-..... merupakan penghapusan atas-..... Adapun penghapusan senilai Rp-..... dan Rp-..... merupakan penghapusan aset pada-..... Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Uraian	Qty	Tahun Perolehan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1					
	Jumlah				

Koreksi kurang sebesar Rp-..... merupakan koreksi kurang atas-..... (rekap terlampir).

3.1.3.2. Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar

Rp .60.600.494 dan Rp. 59.626.213

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2	Pendapatan diterima Dimuka	-	-
3	Utang Beban	60.600.494,-	59.626.213,-
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah	60.600.494,-	59.626.213,-

Rincian utang belanja terdiri dari :

- Rekening Listrik Rumah Dinas Camat sebesar Rp.56.539,-dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2024
- Rekening Listrik Kantor Kecamatan sebesar Rp. 239.720,- dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2024
- Rekening Listrik Pendopo sebesar Rp. 274.152,- dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2024

- Rekening Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2023 sebesar Rp. 60.030.083,- dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2024.

3.1.3.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp . 6.986.976.916,- dan Rp. 6.986.976.916,-

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp.6.986.976.916,- merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2023 sebagai berikut:

Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp. 6.986.976.916,-
Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp. 0,-
Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. 6.986.976.916,-

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

○ Koreksi Nilai Persediaan sebesar	Rp. 0,-
○ Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar	Rp. 0,-
○ Penilaian Kembali Aset Tetap sebesar	Rp. 0,-

3. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya senilai Rp.0,- merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2023, terdiri dari:

- Pengakuan atas bunga yang terutang sebesar	Rp. 0,-
- Pengakuan atas beban dibayar dimuka sebesar	Rp. 0,-
- Lain-lain sebesar	Rp. 0,-

3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Pos-pos asset yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas sebagaimana telah termuat dalam Bab III, indikator pencapaian target kinerja APBD dan Bab II, 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.

Pengungkapannya bahwa tanggungjawab SKPD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai perundang-undang.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintahan Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri 50 (lima puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seluruhnya tersebar di wilayah Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membuat laporan keuangan tahun 2023 dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Teantang pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Berbasis Akruaal.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal pada Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Karangsembung Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta perwujudan akuntabilitas SKPD sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN

SAMPURNO, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660105 1986031012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMPURNO, S.Sos., M.M.
NIP : 19660105 1986031012
Jabatan : CAMAT KARANGSAMBUNG
SKPD/OPD : KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/OPD Kecamatan Karangsembung untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 merupakan tanggungjawab saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
2. Laporan Keuangan SKPD/OPD sebagaimana tersebut nomor 1 yang menjadi tanggungjawab saya meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
3. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 31 Desember 2023

CAMAT KARANGSAMBUNG

SAMPURNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660105 1986031012.

